

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan ekonomi di Indonesia sangatlah pesat, mengenai corporate governance di Indonesia semakin mendapat perhatian khusus setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Survei *Pricewaterhouse Coopers* atas investor internasional pada tahun 2002 menunjukkan bahwa Indonesia pada saat itu menduduki terbawah dal hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi serta peranan direksi, untuk membandingkan kerangka governance di Indonesia dengan negara lain pada satu wilayah (FCGI 2002). Untuk memperbaiki hal tersebut, sejak tahun 1999 telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* dan mengeluarkan pedoman GCG yang telah mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Penerapan *Corporate Governance* diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen suatu perusahaan agar memiliki perilaku yang profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang saham (Irawan dan Aria, 2015). Laporan keuangan terdapat dari sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan para investor di pasar modal. Menurut *Accounting Principal Board* (1970) dan *Financial Accounting Standards Board* (1980)

ketepatan waktu pelaporan merupakan salah satu sifat kualitatif untuk pelaporan keuangan (Ika dan Ghazali (2015)). Sifat kualitatif ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang seharusnya dibuat untuk publik dengan jangka waktu yang wajar dari penutupan akhir tahun keuangan perusahaan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan yang diterbitkan secara tepat waktu menjadi sumber informasi utama bagi para investor di pasar modal dalam hal pengambilan keputusan. Bursa Efek Indonesia mencatat masih banyak terjadi kasus keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Tahun 2015, sebanyak 54 perusahaan terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2014 kepada Bursa Efek Indonesia (www.neraca.co.id) dan tahun 2016 sebanyak 63 perusahaan terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2015 kepada Bursa Efek Indonesia (liputan6.com, 16 Juni 2016), adapun pada tahun 2017 sebanyak 10 perusahaan yang terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2017 kepada Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Masalah keterlambatan dalam pelaporan keuangan dapat diatasi dengan mengimplementasikan *Good Corporate Governance* yaitu salah satunya dengan pembentukan komite audit (Purbasari, 2016). Komite audit yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan proses pelaporan keuangan dapat mendorong manajemen untuk menerbitkan laporan keuangan secara tepat waktu. Auditor dalam melaksanakan tugasnya harus memenuhi standar prosedur yang sudah terdapat pada ISA seperti standar umum atau standar pengerjaannya. Seorang auditor

memerlukan adanya pemahaman dan struktur pengendalian eksternal untuk merencanakan audit dan menentukan sifat saat lingkup pengujian yang akan dilakukan. Bukti audit yang relevan diperoleh dari melalui inspeksi, pengamatan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk memindai yang menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

Informasi keuangan menjadi bagian yang sangat penting bagi pengguna laporan keuangan untuk melihat seberapa jauh kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan dari seluruh pihak yang membutuhkannya (Lianto and Kusuma, 2010). Pihak yang dimaksudkan, yaitu manajemen, pemegang saham, kreditor, dan sebagainya yang membutuhkan informasi laporan keuangan. Laporan keuangan juga berguna untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan sebagai penyedia modal di perusahaan. Terutama laporan keuangan yang sudah diaudit dalam penilaian dan evaluasi kinerja perusahaan. Laporan keuangan yang sudah diaudit akan meningkatkan handal dan para pengguna akan yakin dengan laporan tersebut (Hasyim dan Rahman 2015). Jangka waktu penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep-431/BL/2012 Peraturan Nomor X.K.6 tentang Penyampaian BAPEPAM dan LK tersebut, dijelaskan bahwa perusahaan yang pernyataan pendaftarannya telah efektif, wajib melakukan penyampaian laporan tahunan kepada BAPEPAM dan LK paling lama 120 hari setelah tahun buku berakhir. Meskipun peraturan terkait jangka waktu penyampaian laporan keuangan telah

dibuat, namun berdasarkan data yang diambil dari BEI melalui laman www.idx.co.id menunjukkan bahwa sehingga saat ini, tidak sedikit perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan.

Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam mencapai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah adanya kewajiban laporan keuangan untuk di audit oleh auditor eksternal. Tujuan dilakukan audit adalah untuk menverifikasi apakah laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang disetujui. Dewasa ini, proses dalam melakukan audit semakin tidak mudah, semakin berkembangnya perusahaan dan hambatan dalam proses aktivitas audit laporan keuangan yang semakin kompleks. Hal tersebut dapat terlihat dari standar umum ketiga, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan penyampaian laporannya harus dijalankan dengan penuh ketelitian dan kecermatan serta memperoleh bukti yang memadai (Rachmawati, 2015).

Menurut Hashim dan Rahman (2015), mekanisme *Corporate Governance* memiliki fungsi penting dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang salah satu komponen dari *Good Corporate Governance* adalah komite audit. Komite audit dalam fungsi pengawasannya memiliki fungsi penting dalam mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dikarenakan komite audit bertugas untuk mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses penyampaian laporan keuangan. Komite audit perlu mengetahui berbagai komponen dan karakteristik yang harus dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya agar dapat

berperan secara efektif. *The Blue Ribbon Committee (BRC)* tentang efektivitas komite audit (Purwati, 2006) mengungkapkan bahwa komite audit dapat meningkatkan kualitas proses penyampaian laporan keuangan jika para anggota memiliki independensi, kemampuan dalam memahami laporan keuangan yang baik, tersedianya waktu yang cukup dan melakukan pertemuan secara teratur. Sedangkan menurut DeZoort, dkk (2002) efektivitas komite audit terdiri atas empat unsur dasar yaitu kompetensi, otoritas, sumber daya manusia, dan ketekunan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, Terdapat perbedaan hasil yang diperoleh. Penelitian yang dilakukan Purwati (2016) menemukan bahwa karakteristik komite audit seperti size, keahlian, pertemuan komite, gender serta rapat komite yang memiliki pengaruh positif proksi komite audit terhadap audit report lag perusahaan. Sedangkan Noor, dkk (2014) menemukan bahwa independensi dan keahlian komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Shukeri dan Nelson (2011) yang menemukan bahwa tidak ditemukan bukti yang mendukung independensi komite audit, ukuran komite audit, dan pertemuan komite audit dalam mengurangi *audit report lag*.

Melihat penelitian-penelitian sebelumnya bahwa terdapat hasil yang berbeda terkait hubungan proksi dari karakteristik komite audit dengan audit report lag perusahaan. Oleh sebab itu, penulis merasa sangat perlu untuk meneliti pengaruh karakteristik komite audit terhadap *audit report lag* pada

perusahaan. Namun, penelitian ini tidak hanya difokuskan ke sektor manufaktur, tetapi dari segi seluruh vektor perusahaan yang memiliki laporan tahunan yang detail dan pastinya *Go Public* dalam periode penelitian empat tahun, yakni mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Hal ini dikarenakan hasil penelitian Ika dan Ghazali (2015) menjelaskan bahwa perusahaan jika difokuskan hanya di sektor manufaktur banyak yang terlambat dalam mempublikasikan laporan tahunan perusahaan.

Size menurut karakteristik komite audit adalah berupa teori keagenan, proksi karakteristik komite audit dalam melaksanakan tugas pengawasan dari proses penyampaian laporan keuangan yang dapat menyebabkan persentase tepat waktu informasi keuangan menjadi meningkat. Salah satu cara agar komite audit berjalan secara efektif yaitu dengan memiliki sumber daya yang memadai sehingga komite audit tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik (DeZoort, dkk 2002). Dalam penelitian sebelumnya, terdapat hasil penelitian yang bervariasi terkait proksi *size* dalam karakteristik komite audit terhadap *audit report lag* perusahaan. Purwati (2016) menemukan bahwa *size* atau ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report lag* perusahaan.

Namun penelitian yang dilakukan Noor, dkk (2010) menemukan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh tidak signifikan negatif terhadap *audit report lag* dan menurut pedoman pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional *Good Corporate Governance* menjelaskan bahwa komite audit yang efektif terdiri dari tiga sampai lima anggota. Komite

audit itu menjadi penting dalam terwujudnya komite audit yang efektif.

Keahlian menurut karakteristik komite audit adalah dalam teori agensi dijelaskan bahwa masing-masing individu termotivasi oleh kepentingannya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dengan *agent*. Permasalahan akibat perbedaan kepentingan ini sering disebut dengan *agency problem* (Jensen dan Meckling, 1976). Untuk menghindari terjadinya *agency problem*, salah satu cara yang diterapkan perusahaan adalah penerapan mekanisme *Corporate Governance*, yang salah satu elemennya adalah komite audit. Komite audit yang anggotanya memiliki keahlian keuangan sangat penting dalam rangka menangani efektifitas kinerja auditor eksternal. Hal ini dikarenakan tugas komite audit sebagai mediator antara pihamanajemen dengan auditor eksternal (Hashim dan Rahman, 2011). DeZoort et al. (2003) mengatakan bahwa komite audit yang anggotanya memiliki keahlian keuangan, terutama mereka yang telah memiliki gelar CPA akan memahami tugas auditor dan tanggung jawab auditor, akan memahami tugas auditor dan tanggung jawab auditor, akan menjadi lebih mendukung auditor dan lebih mudah mendukung auditor dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja auditor eksternal. Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menjelaskan bahwa minimal salah satu anggota Komite Audit memiliki kemampuan dalam bidang keuangan. Komite Audit yang anggotanya memiliki kemampuan di bidang keuangan dianggap mampu untuk berkinerja lebih baik, dan dalam hal ini akan memperkecil resiko audit report lag. Purwati (2006), Naimi et al, (2010), dan Hashim dan Rahman (2011) menyatakan bahwa keahlian komite Audit

berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*.

Independensi menurut karakteristik komite audit adalah Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya tidak kurang dari 3 (tiga) orang yang diketuai satu orang komisaris independen dan 2 (dua) orang dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan. Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal anggota komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

Menurut Naimi (2010) salah satu tujuan dari komite audit adalah untuk memberikan ulasan objektif tentang informasi keuangan, dan Komite Audit Independen dapat berkontribusi terhadap kualitas pelaporan keuangan. Perusahaan-perusahaan yang memiliki insentif serta kemampuan untuk meningkatkan komite audit dengan cara memiliki komite audit independen lebih banyak dari jumlah yang disyaratkan oleh undang-undang (Beasley dan Salterio, 2001). Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan bahwa Independensi Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*.

Gender menurut karakteristik komite audit adalah gambaran sifat, sikap, dan perilaku laki-laki dan perempuan (Mikkola, 2005). Keberagaman gender dalam komite audit merupakan suatu aspek yang penting untuk dipelajari untuk mengingat peran komite audit dalam perusahaan. Perusahaan yang baik dan

memiliki GCG yakni terbentuknya anggota komite audit yang beranggotakan laki-laki (homogen) cenderung menghasilkan keputusan yang tidak tepat, berbeda dengan komite audit heterogen akan mampu mengambil keputusan dengan ide-ide yang lebih luwes untuk dikeluarkan. Laki-laki mempunyai karakteristik yang lebih menyukai risiko (Rubin dan Paul, 1979) dan biasanya memproses informasi secara terbatas dalam pengambilan keputusan. Amanatullah et al., (2010) menyatakan bahwa wanita biasanya menunjukkan pilihan yang lebih aman dalam pengambilan keputusan serta lebih teliti dalam menelaah laporan keuangan, yang nantinya akan dapat memperpendek timbulnya audit report lag. Chung dan Monroe (1998) menyatakan bahwa perempuan mengungguli laki-laki dalam hal kemampuan pemrosesan informasi. Laki-laki cenderung memproses informasi secara komprehensif. Dalam hal menyelesaikan masalah, terkadang laki-laki tidak menggunakan semua informasi secara menyeluruh, sebaliknya perempuan dipandang sebagai pemroses informasi yang lebih detail dalam melaksanakan proses informasi pada sebagian besar informasi yang ada untuk pembuatan keputusan. Ashton et al. (1987) menyatakan bahwa *Audit Report Lag* merupakan jangka waktu proses penyelesaian audit yang dihitung dari akhir tahun fiskal sampai tanggal laporan audit yang dikeluarkan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan bahwa gender komite audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*.

Rapat menurut karakteristik komite audit adalah menurut teori keagenan, komite audit yang efektif dalam melaksanakan tugas pengawasan dari proses penyampaian laporan keuangan tersebut dapat mempengaruhi

kualitas penyampaian laporan keuangan yang dapat menyebabkan jangka waktu penyampaian laporan menjadi lebih cepat. Komite audit yang efektif dapat dilihat dari aktifitas yang dilakukan komite audit, seberapa sering komite audit tersebut melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan dan tanggung jawab mereka sebagai komite audit. Dalam piagam komite audit yaitu ketentuan tertulis yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab komite audit dan lingkup kerjanya menjelaskan bahwa salah satu yang termasuk dalam piagam komite audit tersebut adalah rapat dan pertemuan, yang paling sedikit dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Noor, dkk (2010) juga menemukan dalam penelitiannya bahwa pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Dari penjelasan tersebut, pertemuan komite audit dapat dijadikan sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan efektivitas komite audit. Berdasarkan penjelasan tersebut yang dirumuskan pada penelitian ini menjadi bahwa rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*.

Berdasarkan hasil sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hasil berbeda dan tidak signifikan mengenai faktor proksi dari komite audit yang mempengaruhi *audit report lag*. Penelitian ini dilakukan guna menguji kembali hasil dari proksi komite audit yang mempengaruhi *audit report lag* dengan menggunakan variabel size, keahlian, independensi, gender, rapat, dan jumlah anggota dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya dan dari hasil penelitian yang berbeda serta tidak signifikan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris dari **Pengaruh Karakteristik Komite Audit**

Terhadap *Audit Report Lag* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mengetahui faktor-faktor dari karakteristik komite audit yang berpengaruh terhadap *audit report lag*, sehingga nantinya perusahaan bisa dengan tepat dalam menyampaikan laporan keuangan auditnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Hubungan antara teori keagenan dengan variabel yang ada dalam penelitian ini dimana pihak yang akan menjadi agen atau pihak yang diberi tugas yaitu adalah auditor yang akan menjalankan tugasnya untuk memeriksa laporan keuangan dan nantinya akan dipublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor. Sedangkan pihak yang memberi tugas atau mandate ialah pihak manajemen perusahaan yang telah menyusun laporan keuangan dan nantinya akan di audit oleh auditor. Apabila laporan keuangan audit mengalami keterlambatan dalam publikasi di BEI, maka nantinya pihak perusahaan akan dirugikan karena bisa berpengaruh terhadap harga saham serta hukuman yang diperoleh, begitu juga dengan kantor KAP akan mendapatkan reputasi yang buruk jika melakukan keterlambatan dalam mengeluarkan laporan keuangan audit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat ditentukan perumusan masalah dalam *Audit Report Lag*:

1. Apakah Size Komite Audit memiliki pengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah keahlian Komite Audit memiliki pengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah independensi Komite Audit memiliki pengaruh *audit report lag* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah gender Komite Audit memiliki pengaruh *audit report lag* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah rapat Komite Audit memiliki pengaruh *audit report lag* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguji:

1. Ukuran Komite Audit memiliki pengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Keahlian Komite Audit memiliki pengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Independensi Komite Audit memiliki pengaruh terhadap *audit report*

lag pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

4. Gender Komite Audit memiliki pengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
5. Rapat Komite Audit memiliki pengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Auditor: untuk mengetahui faktor – faktor yang dapat menyebabkan *audit report lag*. Sehingga auditor bisa meningkatkan performa kerjanya agar tidak terjadi terlambatnya dalam mengaudit laporan keuangan.
2. Bagi Akademisi: Untuk memberikan penjelasan terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi *audit report lag* dan menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan terhadap *audit report lag*.
3. Bagi peneliti: hasil penelitian ini nantinya bisa dijadikan pedoman untuk menyusun penelitian lain mengenai *audit report lag*.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Penelitian Terdahulu, Landasan Teori Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dalam penelitian ini dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Isi dari bab ini meliputi: Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel, Data dan Metode Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil wawancara atau penelitian yang sudah dilakukan dan mendeskripsikan secara lengkap, detail dan terperinci.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian

dan saran yang diberikan.

